



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama,
hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ngele Ngele Kecil, 26 Januari 2000,
agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di
RT.002/RW.001, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Fayaul, 01 Juli 1994, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman
KABUPATEN PULAU MOROTAI, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Oktober
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 12 Juli 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Morotai Selatan. Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/03/VII/2021. Tertanggal 12 Juli 2021; status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah gadis;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 1 tahun, sampai kemudian pisah;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri *Ba'da dukhul*, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan :
 - 4.1 Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 4.2 Bahwa Pemohon memiliki usaha penjualan ikan namun hasil usaha tersebut tidak dapat dikelola oleh Termohon padahal semua hasil usahanya sudah dipercayakan kepada Termohon;
 - 4.3 Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2022 yang disebabkan karena Termohon keluar dari rumah dan pergi dengan alasan menjenguk ibunya di Desa Fayaul, Kecamatan Wasile, kabupaten Halmahera Timur, namun setelah balik ke xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Termohon dan keluarganya mengundang imam dan perangkat desa ngele-ngele kecil untuk menjadi mediator dalam permasalahan rumah tangganya, namun mediasi tersebut tidak berhasil dan hasil dari mediasi tersebut Pemohon bersedia mendaftarkan perkara cerai atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi Bersama dan pisah tempat tinggal hingga saat ini, Pemohon tinggal di RT003/RW001 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (*rumah keluarga Pemohon*) dan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (*rumah pamanTermohon*);

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/03/VII/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Morotai Selatan, tanggal 12 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterei dan *dinazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P. dan diparaf;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PULAU MOROTAI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 1 tahun, sampai kemudian pisah;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri *Ba'da dukhul*, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2022 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan, orang tua Termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon memiliki usaha penjualan ikan namun hasil usaha tersebut tidak dapat dikelola oleh Termohon padahal semua hasil usahanya sudah dipercayakan kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2022 yang disebabkan karena Termohon keluar dari rumah dan pergi dengan alasan menjenguk ibunya di Desa Fayaul, Kecamatan Wasile, kabupaten Halmahera Timur, namun setelah balik ke xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Termohon dan keluarganya mengundang imam dan perangkat desa ngele-ngele kecil untuk menjadi mediator dalam permasalahan rumah tangganya, namun mediasi tersebut tidak berhasil dan hasil dari mediasi tersebut Pemohon bersedia mendaftarkan perkara cerai atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak lagi Bersama dan pisah tempat tinggal hingga saat ini, Pemohon tinggal di RT003/RW001 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (*rumah keluarga Pemohon*) dan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (rumah pamanTermohon);

- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah diusahakan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN PULAU MOROTAI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX selama kurang lebih 1 tahun, sampai kemudian pisah;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri *Ba'da dukhul*, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2022 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan, orang tua Termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon memiliki usaha penjualan ikan namun hasil usaha tersebut tidak dapat dikelola oleh Termohon padahal semua hasil usahanya sudah dipercayakan kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2022 yang disebabkan karena Termohon keluar dari rumah dan pergi dengan alasan menjenguk ibunya di Desa Fayaul, Kecamatan Wasile, kabupaten Halmahera Timur, namun setelah balik ke xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Termohon dan keluarganya mengundang imam dan perangkat desa ngele-ngele kecil untuk menjadi mediator dalam permasalahan rumah tangganya, namun mediasi tersebut tidak berhasil dan hasil dari mediasi tersebut Pemohon bersedia mendaftarkan perkara cerai atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak lagi Bersama dan pisah tempat tinggal hingga saat ini, Pemohon tinggal di RT003/RW001 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (rumah keluarga Pemohon) dan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (rumah pamanTermohon);
- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah diusahakan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Bahwa Pemohon memiliki usaha penjualan ikan namun hasil usaha tersebut tidak dapat dikelola oleh Termohon padahal semua hasil usahanya sudah dipercayakan kepada Termohon, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, sehingga dengan keadaan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin, 12 Juli 2021, relevan dengan dalil yang hendak di buktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juli 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Morotai Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/5/VII/2005, tertanggal 20 Mei 2024, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri *Ba'da dukhul*, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran orang tua Termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon memiliki usaha penjualan ikan namun hasil usaha tersebut tidak dapat dikelola oleh Termohon padahal semua hasil usahanya sudah dipercayakan kepada Termohon, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah dan menjalani hidup sendiri-sendiri tanpa ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluar telah berupaya mendamaikan dan juga disetiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiva dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Irretrievable

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

breakdown) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Mut'ah (Kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan menyanggupinya untuk memberikan seperti Mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa 2 gram cincin emas, Hakim dengan memperhatikan kesanggupan tersebut maka cukup bijaksana apabila Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sesuai batas kemampuannya dan kerelaannya yaitu berupa 2 gram cincin, serta harus diserahkan sesaat sebelum diucapkannya Ikrar Talak di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surah Al-Ahzab (33) ayat: 49 yang berbunyi;

Artinya: "Bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Morotai pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

Dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

Maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Pembebanan Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan harus diserahkan sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Hasanuddin Hamzah, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.MORTB.